

MODEL KOLABORASI PEMERINTAH, LEMBAGA AGAMA, DAN MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN ANAK JALANAN UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Chicha Herwendi¹

¹Universitas Kristen Indonesia Maluku

Email: herwendichicha@gmail.com

Abstract: *Street children remain one of the major social challenges in Indonesia's human development. Their existence is not merely associated with economic poverty but is also influenced by weak family resilience, limited access to education, inadequate social protection, and the lack of collaboration among stakeholders in fulfilling children's rights. As a result, street children experience school dropout, economic exploitation, violence, and social marginalization. This study aims to analyze the factors contributing to the emergence of street children in Ambon City, identify the roles of government, religious institutions, and society in addressing the issue, and formulate a collaborative model to support child protection and inclusive education. This study employed a qualitative ethnographic approach. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The informants included street children, parents, government officials, religious leaders, shelter managers, and community leaders. The findings indicate that poverty, family disintegration, low educational attainment, and weak social protection are the dominant factors leading children to live and work on the streets. Government interventions remain largely short-term, while religious institutions and communities have not yet been integrated into a comprehensive child protection system. This study proposes the 3P Collaboration Model (Government–Religious Institutions–Community) as an integrated strategy combining social protection, educational support, family empowerment, and local social capital to promote inclusive education and improve the welfare of street children.*

Keywords: *Street Children, Inclusive Education, Child Protection, Social Welfare, Multi-Stakeholder Collaboration.*

Abstrak: Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang hingga kini masih menjadi tantangan dalam pembangunan manusia di Indonesia. Keberadaan anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan lemahnya ketahanan keluarga, rendahnya akses terhadap pendidikan, kurang optimalnya perlindungan sosial, serta belum terbangunnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam pemenuhan hak-hak anak. Kondisi tersebut menyebabkan anak jalanan mengalami berbagai bentuk kerentanan, seperti putus sekolah, eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan marginalisasi sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya anak jalanan di Kota Ambon, mengidentifikasi peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam penanganannya, serta merumuskan model kolaboratif yang mendukung perlindungan anak dan pendidikan inklusif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara

mendalam, dokumentasi, dan studi pustaka. Informan terdiri atas anak jalanan, orang tua, pemerintah daerah, tokoh agama, pengelola rumah singgah, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan, disintegrasi keluarga, rendahnya pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial merupakan faktor dominan yang mendorong anak berada di jalan. Penanganan yang dilakukan pemerintah masih berorientasi pada pembinaan jangka pendek, sedangkan lembaga agama dan masyarakat belum terintegrasi dalam sistem perlindungan anak. Penelitian ini menawarkan Model Kolaborasi 3P (Pemerintah–Lembaga Agama–Masyarakat) sebagai pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan perlindungan sosial, penguatan pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan modal sosial lokal untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif serta meningkatkan kesejahteraan anak jalanan.

Kata Kunci: Anak Jalanan, Pendidikan Inklusif, Perlindungan Anak, Kesejahteraan Sosial, Kolaborasi Multipihak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemenuhan hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga sosial. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok anak yang hidup dalam kondisi rentan sehingga belum menikmati hak-hak dasarnya secara utuh. Salah satu kelompok yang paling rentan adalah anak jalanan.

Fenomena anak jalanan hingga saat ini masih menjadi persoalan serius di berbagai kota di Indonesia. Keberadaan mereka tidak hanya menggambarkan persoalan kemiskinan, tetapi juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem perlindungan anak, akses terhadap pendidikan, serta lemahnya dukungan sosial yang diberikan kepada keluarga. Anak-anak yang hidup dan bekerja di jalan menghadapi berbagai risiko, seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik maupun psikologis,

penyalahgunaan narkotika, perdagangan orang, hingga putus sekolah. Kondisi tersebut menyebabkan anak kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal sebagai generasi penerus bangsa.

Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku tidak terlepas dari persoalan tersebut. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa anak jalanan masih dapat dijumpai di sejumlah titik strategis, seperti kawasan Jembatan Merah Putih (JMP), Pasar Mardika, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) MCM, kawasan pusat perbelanjaan, dan persimpangan jalan utama. Sebagian besar dari mereka bekerja sebagai pengamen, penjual tisu, pengemis, atau melakukan pekerjaan informal lainnya untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan anak jalanan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan.

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya

banyak anak jalanan mengalami putus sekolah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal secara memadai. Keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar, serta tuntutan untuk bekerja menjadi penyebab utama terhambatnya akses pendidikan. Akibatnya, anak jalanan menghadapi kesulitan untuk meningkatkan kualitas hidup dan berpotensi mewariskan siklus kemiskinan kepada generasi berikutnya.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya menjelaskan fenomena anak jalanan dari perspektif kemiskinan, perlindungan sosial, atau kebijakan pemerintah. Penelitian lain lebih banyak menyoroti program rehabilitasi sosial, rumah singgah, maupun pendekatan kesejahteraan sosial. Namun, masih sedikit penelitian yang mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam satu model kolaboratif yang secara khusus diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak sekaligus mendukung pendidikan inklusif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan Model Kolaborasi 3P (Pemerintah–Lembaga Agama–Masyarakat) sebagai kebaruan (*novelty*) penelitian. Model tersebut menempatkan pemerintah sebagai penyusun kebijakan dan penyedia layanan dasar, lembaga agama sebagai penggerak pendidikan karakter, pendampingan keluarga, dan pelayanan sosial, serta masyarakat sebagai penguat modal sosial melalui nilai-nilai lokal seperti *masohi*. Kolaborasi ketiga unsur tersebut diharapkan mampu membangun sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif, memperluas akses pendidikan inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis faktor-faktor

yang menyebabkan anak menjadi anak jalanan di Kota Ambon; (2) mengidentifikasi peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan; serta (3) merumuskan model kolaborasi multipihak yang dapat mendukung perlindungan anak dan mewujudkan pendidikan yang inklusif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perlindungan anak dan pendidikan, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam merancang kebijakan serta program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan anak jalanan, pola interaksi sosial yang mereka bangun, serta pengalaman mereka dalam memperoleh perlindungan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Metode etnografi memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman hidup para informan sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena anak jalanan di Kota Ambon.

Penelitian dilaksanakan di Kota Ambon, Provinsi Maluku, yang dipilih karena masih terdapat aktivitas anak jalanan pada beberapa ruang publik. Lokasi penelitian meliputi kawasan Jembatan Merah Putih (JMP), Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) MCM, Pasar Mardika, dan Rumah Singgah Sahabat Melindungi. Lokasi tersebut dipilih secara purposif karena menjadi tempat beraktivitas anak jalanan sekaligus lokasi pelaksanaan berbagai program pembinaan oleh pemerintah maupun lembaga sosial.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait fenomena anak jalanan. Informan terdiri atas anak jalanan, orang tua, pejabat Dinas Sosial Kota Ambon, tokoh Gereja Protestan Maluku (GPM), tokoh Muhammadiyah, pengelola Rumah Singgah Sahabat Melindungi, aparat pemerintah, serta tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara bertahap hingga data yang diperoleh mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), sehingga informasi yang diperoleh dianggap mampu menjelaskan fokus penelitian secara menyeluruh.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat teknik. Pertama, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas anak jalanan, pola interaksi dengan masyarakat, serta kondisi lingkungan tempat mereka bekerja. Kedua, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab anak turun ke jalan, bentuk perlindungan yang diterima, akses terhadap pendidikan, serta peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat dalam penanganan anak jalanan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen kebijakan pemerintah, laporan Dinas Sosial, arsip rumah singgah, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak. Keempat, studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teoritis melalui telaah buku, artikel jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi,

seluruh hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi diseleksi, dikelompokkan, dan difokuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola hubungan antarvariabel. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses interpretasi terhadap seluruh temuan penelitian untuk memperoleh pemahaman mengenai model kolaborasi dalam penanganan anak jalanan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari anak jalanan, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, *member checking* dilakukan dengan meminta beberapa informan meninjau kembali hasil wawancara agar sesuai dengan pengalaman yang mereka sampaikan. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas hasil penelitian.

Penelitian ini juga memperhatikan aspek etika penelitian. Seluruh informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian sebelum wawancara dilakukan dan memberikan persetujuan secara sukarela. Identitas informan dijaga kerahasiaannya, khususnya anak jalanan, dengan menggunakan kode atau nama samaran dalam proses penyajian data. Penerapan prinsip etika penelitian ini bertujuan untuk melindungi hak-hak informan sekaligus menjaga integritas proses penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini mengungkap bahwa fenomena anak jalanan di Kota Ambon merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, ditemukan bahwa keberadaan anak jalanan tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi keluarga, rendahnya akses pendidikan, lemahnya perlindungan sosial, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan anak jalanan. Temuan penelitian disajikan berdasarkan empat aspek utama, yaitu karakteristik anak jalanan, faktor penyebab anak menjadi anak jalanan, kondisi akses pendidikan, dan bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama, serta masyarakat.

1) Karakteristik Anak Jalanan di Kota Ambon

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak jalanan yang menjadi informan berusia antara 8 hingga 17 tahun. Sebagian besar masih memiliki orang tua dan tempat tinggal, namun mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Aktivitas yang dilakukan meliputi mengamen, menjual tisu, menjual makanan ringan, mengemis, dan membantu pekerjaan informal lainnya di kawasan Jembatan Merah Putih (JMP), Pasar Mardika, JPO MCM, dan beberapa persimpangan jalan di Kota Ambon.

Sebagian besar informan berasal dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan pekerjaan tidak tetap, seperti buruh harian, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan keluarga tidak mampu

memenuhi kebutuhan dasar sehingga anak didorong untuk turut mencari penghasilan.

Tabel 1. Karakteristik Informan Anak Jalanan

Karakteristik	Hasil Temuan
Usia	8–17 tahun
Jenis kelamin	Laki-laki dan perempuan
Pendidikan	Masih sekolah, putus sekolah, dan tidak sekolah
Pekerjaan di jalan	Pengamen, penjual tisu, pengemis, penjual makanan ringan
Lokasi aktivitas	JMP, Pasar Mardika, JPO MCM, pusat keramaian
Latar belakang keluarga	Keluarga berpenghasilan rendah dan pekerjaan tidak tetap

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anak jalanan masih berada pada usia sekolah sehingga memerlukan perlindungan dan dukungan agar tetap memperoleh hak atas pendidikan.

2) Faktor Penyebab Anak Menjadi Anak Jalanan

Penelitian menemukan bahwa terdapat empat faktor dominan yang menyebabkan anak berada di jalan.

a. Kemiskinan

Kemiskinan menjadi faktor utama yang mendorong anak bekerja di jalan. Sebagian besar keluarga informan mengalami keterbatasan ekonomi sehingga anak diminta membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pendapatan yang diperoleh anak, meskipun relatif kecil,

dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa anak bekerja sejak pagi hingga malam hari setelah pulang sekolah, bahkan ada yang tidak lagi bersekolah karena memilih bekerja penuh waktu.

b. Disintegrasi Keluarga

Selain faktor ekonomi, penelitian menemukan bahwa konflik keluarga, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurangnya perhatian orang tua turut memengaruhi keputusan anak untuk menghabiskan waktu di jalan. Beberapa informan mengaku merasa lebih nyaman berada di luar rumah dibandingkan di lingkungan keluarga yang penuh konflik.

c. Rendahnya Akses Pendidikan

Sebagian anak jalanan mengalami putus sekolah karena keterbatasan biaya, rendahnya motivasi belajar, dan tuntutan ekonomi keluarga. Meskipun pemerintah menyediakan program pendidikan, sebagian keluarga belum mampu memenuhi kebutuhan pendukung seperti transportasi, seragam, maupun perlengkapan sekolah.

d. Pengaruh Lingkungan Sosial

Teman sebaya juga menjadi faktor yang mendorong anak turun ke jalan. Anak-anak yang telah lebih dahulu bekerja di jalan mengajak teman lainnya karena menganggap aktivitas tersebut mampu menghasilkan uang secara cepat tanpa memerlukan keterampilan khusus.

3) Kondisi Pendidikan Anak Jalanan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan aspek yang paling terdampak akibat kehidupan di jalan. Sebagian besar anak mengalami penurunan motivasi

belajar karena kelelahan bekerja, sedangkan beberapa lainnya telah berhenti sekolah.

Anak-anak yang masih bersekolah umumnya mengalami kesulitan membagi waktu antara belajar dan bekerja. Kondisi tersebut menyebabkan prestasi akademik menurun serta meningkatkan risiko putus sekolah.

Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa belum tersedia program pendidikan alternatif yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak jalanan di Kota Ambon. Program pendampingan belajar masih bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif rumah singgah maupun lembaga keagamaan.

4) Bentuk Penanganan Anak Jalanan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan dilakukan oleh beberapa pihak.

Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial melaksanakan kegiatan pendataan, patroli, pembinaan sosial, rehabilitasi, dan koordinasi dengan Satpol PP. Namun, program tersebut lebih berorientasi pada penertiban sehingga belum mampu menyelesaikan akar persoalan.

Lembaga agama, khususnya Gereja Protestan Maluku (GPM) dan Muhammadiyah, memberikan bantuan pendidikan, pelayanan diakonia, pembinaan rohani, serta dukungan kepada rumah singgah. Meskipun demikian, kegiatan tersebut masih terbatas dan belum menjadi bagian dari sistem perlindungan anak yang terintegrasi.

Masyarakat juga menunjukkan kepedulian melalui budaya masohi, yaitu semangat gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk bantuan kepada keluarga kurang mampu, pemberian makanan, maupun dukungan terhadap kegiatan sosial. Akan tetapi, penelitian juga menemukan masih adanya stigma negatif terhadap anak

jalanannya sehingga menghambat proses reintegrasi sosial mereka.

5) Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan keseluruhan data lapangan, penelitian ini menghasilkan lima temuan utama.

1. Fenomena anak jalanan di Kota Ambon merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh kemiskinan, tetapi juga oleh disintegrasi keluarga, rendahnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial.
2. Akses pendidikan anak jalanan masih belum optimal sehingga meningkatkan risiko putus sekolah dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.
3. Program pemerintah lebih banyak berorientasi pada penanganan jangka pendek dibandingkan pencegahan yang berkelanjutan.
4. Lembaga agama dan masyarakat memiliki potensi besar dalam mendukung perlindungan anak, namun kolaborasi antaraktor belum berjalan secara sistematis.
5. Penelitian ini menemukan perlunya model kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga agama, dan masyarakat sebagai satu kesatuan dalam perlindungan anak dan penguatan pendidikan inklusif.

Pembahasan

A. Anak Jalanan sebagai Kelompok Rentan dalam Perspektif Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Ambon merupakan konsekuensi dari persoalan sosial yang bersifat multidimensional. Kemiskinan memang menjadi faktor dominan, namun

penelitian ini membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya penyebab anak turun ke jalan. Konflik keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, lemahnya perlindungan sosial, dan pengaruh lingkungan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap munculnya fenomena anak jalanan. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan ekonomi, tetapi harus mencakup penguatan fungsi keluarga, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Temuan tersebut sejalan dengan teori James Midgley yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan (*charity*), tetapi harus diarahkan pada pembangunan kapasitas individu dan komunitas (*social development*). Dalam konteks anak jalanan, pembangunan kapasitas tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses pendidikan, peningkatan keterampilan hidup, penguatan ketahanan keluarga, dan perluasan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, keberhasilan penanganan anak jalanan tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah anak yang berada di jalan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup dan kesempatan mereka untuk berkembang sebagai warga negara yang bermartabat.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa sebagian besar anak jalanan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, rasa aman, dan pengakuan sosial. Kondisi tersebut memperkuat teori Abraham Maslow yang menyatakan bahwa individu tidak dapat mencapai aktualisasi diri apabila kebutuhan fisiologis dan rasa aman belum terpenuhi. Dalam penelitian ini terlihat bahwa anak-anak lebih banyak memikirkan bagaimana memperoleh penghasilan setiap hari dibandingkan melanjutkan pendidikan atau

mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas dalam setiap program perlindungan anak.

B. Pendidikan Inklusif sebagai Strategi Perlindungan Anak

Penelitian menemukan bahwa pendidikan merupakan aspek yang paling terdampak dari kehidupan anak jalanan. Sebagian besar informan mengalami putus sekolah, sering tidak masuk sekolah, atau memiliki prestasi belajar yang rendah akibat harus bekerja di jalan. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan belum sepenuhnya dapat diakses oleh seluruh anak, khususnya mereka yang berasal dari kelompok rentan.

Konsep pendidikan inklusif tidak hanya dimaknai sebagai penerimaan peserta didik di sekolah, tetapi juga sebagai sistem pendidikan yang mampu menghilangkan hambatan ekonomi, sosial, dan budaya sehingga setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang sama. Oleh karena itu, pendidikan inklusif bagi anak jalanan harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan fleksibilitas layanan pendidikan, pendampingan psikososial, bantuan biaya pendidikan, dan penguatan hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa rumah singgah dan lembaga keagamaan telah berupaya memberikan layanan belajar, bimbingan, dan pendampingan kepada anak jalanan. Namun, program tersebut masih bersifat terbatas karena belum menjadi bagian dari kebijakan pendidikan daerah yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, sekolah, lembaga agama, dan organisasi

masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak jalanan.

C. Peran Pemerintah, Lembaga Agama, dan Masyarakat dalam Perlindungan Anak

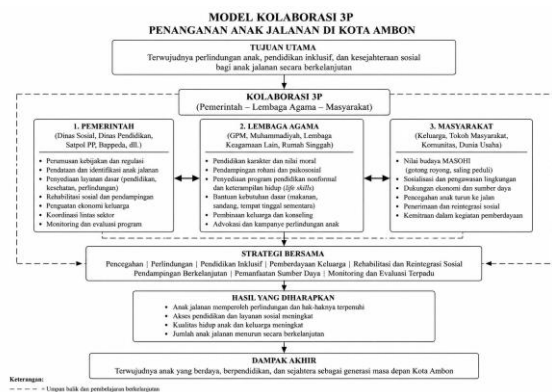
Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan anak jalanan selama ini masih berjalan secara sektoral. Pemerintah lebih banyak melaksanakan penertiban dan rehabilitasi, sedangkan lembaga agama dan masyarakat menjalankan pelayanan sosial berdasarkan inisiatif masing-masing. Akibatnya, berbagai program yang telah dilakukan belum memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap penurunan jumlah anak jalanan.

Dalam perspektif Amartya Sen, kesejahteraan tidak hanya diukur dari kepemilikan sumber daya, tetapi juga dari kemampuan (*capability*) seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai. Anak jalanan mungkin memperoleh penghasilan dari aktivitas di jalan, tetapi mereka kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri. Oleh sebab itu, kebijakan publik harus diarahkan pada peningkatan kemampuan anak melalui pendidikan, kesehatan, perlindungan hukum, dan pemberdayaan keluarga.

Temuan penelitian juga memperkuat pandangan Bill Jordan mengenai *welfare pluralism*, yaitu bahwa kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, lembaga agama, dan sektor lainnya. Dalam konteks Kota Ambon, budaya masohi menjadi modal sosial yang sangat potensial untuk mendukung kolaborasi tersebut. Nilai saling membantu, kebersamaan, dan solidaritas yang hidup dalam masyarakat Maluku dapat menjadi dasar dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas.

D. Model Kolaborasi 3P sebagai Kebaruan Penelitian

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan Model Kolaborasi 3P (Pemerintah–Lembaga Agama–Masyarakat). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada peran pemerintah atau lembaga sosial secara terpisah, model ini mengintegrasikan tiga aktor utama dalam satu sistem perlindungan anak yang saling melengkapi.



Model ini menempatkan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan penyedia layanan dasar, lembaga agama sebagai penggerak pendidikan karakter dan pendampingan keluarga, serta masyarakat sebagai penguat modal sosial berbasis budaya *masohi*. Ketiga unsur tersebut bekerja secara sinergis melalui forum koordinasi yang berorientasi pada pencegahan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak anak.

Model Kolaborasi 3P memiliki beberapa keunggulan. Pertama, pendekatan ini tidak lagi bersifat reaktif melalui razia, tetapi lebih menekankan upaya pencegahan. Kedua, pendidikan ditempatkan sebagai strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Ketiga, pemberdayaan keluarga menjadi bagian

integral dari perlindungan anak sehingga anak tidak terdorong kembali ke jalan. Keempat, model ini memanfaatkan modal sosial lokal melalui nilai *masohi* sebagai kekuatan masyarakat dalam melindungi anak.

Dengan demikian, Model Kolaborasi 3P tidak hanya memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan ilmu kesejahteraan sosial dan pendidikan, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Kota Ambon maupun daerah lain yang menghadapi persoalan serupa

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena anak jalanan di Kota Ambon merupakan persoalan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemiskinan keluarga, disintegrasi keluarga, rendahnya akses terhadap pendidikan, serta lemahnya perlindungan sosial menjadi faktor dominan yang mendorong anak berada dan bekerja di jalan. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko putus sekolah, eksploitasi ekonomi, kekerasan, dan marginalisasi sosial sehingga menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Sosial, lembaga keagamaan, rumah singgah, dan masyarakat belum berjalan secara terpadu. Program pemerintah masih didominasi pendekatan kuratif melalui penertiban dan rehabilitasi, sedangkan lembaga agama lebih banyak berfokus pada pelayanan sosial dan pembinaan rohani. Masyarakat memiliki potensi melalui nilai budaya *masohi*, tetapi perannya belum terorganisasi secara sistematis dalam perlindungan anak.

Kontribusi utama penelitian ini adalah perumusan Model Kolaborasi 3P (Pemerintah–

Lembaga Agama–Masyarakat) sebagai model perlindungan anak jalanan yang mengintegrasikan kebijakan pemerintah, pelayanan sosial dan pendidikan oleh lembaga agama, serta partisipasi masyarakat berbasis nilai *masohi*. Model ini menempatkan pendidikan inklusif sebagai strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak.

Melalui model tersebut, perlindungan anak tidak lagi dipahami sebagai tanggung jawab pemerintah semata, melainkan sebagai tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Midgley, J. (1995). *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Maslow, A. H. (1954). *Motivation and Personality*. Harper & Row.
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNICEF Indonesia. (2021). *Situation Analysis of Children in Indonesia*. UNICEF Indonesia.
- United Nations. (2022). *Transforming Education Summit Report*. United Nations.
- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education. *International Journal of Inclusive Education*.
- Booth, T., & Ainscow, M. (2021). *The Index for Inclusion*. Centre for Studies on Inclusive Education.
- OECD. (2023). *Education at a Glance 2023*. OECD Publishing.
- UNESCO. (2020). *Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education – All Means All*. UNESCO.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO.
- Artikel-artikel jurnal nasional terbaru (2021–2026) mengenai anak jalanan, perlindungan anak, pendidikan inklusif, kesejahteraan sosial, dan kolaborasi multipihak yang relevan dengan topik penelitian.